

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan Pembangunan

Perencanaan pembangunan di Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dapat dipecahkan, maka setiap permasalahan selain diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya di masa lalu, juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan melihat penyebab kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang diinginkan dimasa datang dengan kondisi ril saat perencanaan yang dibuat. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja

pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan selama lima tahun terakhir berdasarkan 17 arah pembangunan.

Berdasarkan data hasil evaluasi pada bab dua, maka kesenjangan atau gap pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dapat di rumuskan permasalahan utama pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumberdaya manusia belum berdaya saing;
2. Masih rendahnya daya saing sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan dan pariwisata;
3. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas belum sepenuhnya terwujud;
4. Kondusifitas daerah dan stabilitas ekonomi makro perlu dijaga dan ditingkatkan;
5. Potensi bencana daerah yang cukup tinggi serta adanya ancaman degradasi lingkungan hidup;
6. Disparitas pembangunan antar wilayah masih cukup tinggi;
7. Dukungan sarana dan prasarana dasar belum memadai;
8. Inovasi pembiayaan pembangunan dalam mendukung kesinambungan pembangunan masih terbatas.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2045 serta hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, diidentifikasi bahwa yang menjadi faktor penghambat penting permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Faktor penghambat pada kualitas sumberdaya manusia adalah terkait dengan Pembangunan sosial yaitu SDM Kesehatan, SDM Pendidikan dan SDM Ketenagakerjaan. Tingkat kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah masih dibawah rata-rata nasional yaitu Umur Harapan Hidup serta Angka pravelensi Stunting. Demikian halnya dengan SDM Pendidikan yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia masih dibawah rata-rata nasional. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga masih kurang dapat dilihat pada capaian RLS, HLS dan APM, walaupun capaian Sulawesi Tengah untuk capaian RLS dan HLS sudah diatas rata-rata nasional, tetapi angka APM masih dibawah nasional.

2. Sektor potensial bernilai tambah untuk mendukung arah pengembangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah komoditas pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, industri logam dasar serta pariwisata, namun pemanfaatan potensi-potensi tersebut belum bisa terwujud secara optimal.
3. Faktor penghambat pada tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya terwujud adalah terkait pelayanan publik belum maksimal, penyelenggaraan pemerintah masih belum optimal utamanya dalam memanfaatkan Teknologi informasi dan komunikasi.
4. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah (15,27 persen) belum berdampak sepenuhnya kepada kesejahteraan masyarakat. Rendahnya daya saing juga menjadi faktor penghambat, Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan (KEK) belum memberikan dampak secara optimal dalam penurunan persentase penduduk miskin. Aspek pembiayaan yaitu share penyaluran kredit perbankan khususnya kredit investasi dan kredit sektor jasa masih cenderung rendah.
5. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang memiliki resiko bencana yang cukup tinggi, terutama terkait dengan gempa bumi dan likuifaksi. Potensi resiko bencana geologi seperti gempa tektonik dijalur patahan Palu-Koro yang membelah dari Teluk Palu hingga Lembah Bone masih dominan. Bahaya Tsunami juga dapat mengancam kawasan pariwisata di wilayah pesisir. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan resiko bahaya dan terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi bencana akan meningkatkan resiko terhadap bencana.
6. Faktor penghambat pada disparitas pembangunan antar wilayah adalah belum adanya pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Aspek Infrastruktur masih menjadi faktor penghambat pembangunan, keterbatasan kapasitas dan fasilitas pelabuhan di Sulawesi Tengah menyebabkan kapal-kapal konteiner belum beroperasi secara maksimal, Bandara utama Bandara Mutiara sis Aljufri masih memerlukan pengembangan baik dari sisi kapasitas maupun integrasi terhadap wilayah hinterland serta dan multimoda untuk menunjang pariwisata dan sebagai simpul logistic angkutan barang. Kualitas dan kuantitas jalan serta ketersediaan dan rehabilitasi listrik masih kurang. Sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi belum terpenuhi secara optimal, jaringan telekomunikasi juga masih relatif rendah serta pasokan listrik untuk sistem terisolir sebagian masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar minyak.
8. Masih terbatasnya inovasi pembiayaan Pembangunan Daerah karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih terbatas dan Pembangunan Daerah khususnya Infrastruktur yang membutuhkan Investasi yang cukup besar.

Dari permasalahan utama diatas dapat dijabarkan kedalam tabel dibawah beserta faktor penghambat masing-masing permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Masalah Utama serta Faktor Penghambat Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
1. Kualitas Sumberdaya Manusia Belum Berdaya Saing;	1. Kualitas dan keterjangkauan Layanan Kesehatan belum optimal, responsif dan merata;	1. Kendala geografis pada beberapa wilayah menyebabkan sulitnya akses ke fasilitas Kesehatan; 2. Sarana dan prasarana di fasilitas dan pelayanan kesehatan belummemadai; 3. etersediaan Sumber daya manusia Kesehatan masih terbatas dan belum merata; 4. Kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih rendah;

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		<p>5. Pola Asuh, Pola Makan dan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak belum memadai sehingga menyebabkan tingginya prevalensi stunting.</p>
	<p>2. Pendidikan belum berkualitas dan merata;</p>	<p>1. Kendala geografis pada beberapa wilayah menyebabkan sulitnya akses ke fasilitas pendidikan;</p> <p>2. Sarana dan Prasarana serta Fasilitas pembelajaran relatif belum memadai, baik Pendidikan formal maupun Pendidikan Non Formal;</p> <p>3. Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar belum optimal;</p> <p>4. Keterbatasan akses internet di beberapa wilayah belum optimal sehingga digitalisasi Pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar masih terkendala;</p> <p>5. Jumlah Guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah;</p> <p>6. Sebaran, Kualitas dan Kuantitas Tenaga pendidik dan kependidikan yang kurang dan tidak merata;</p> <p>7. Kemampuan literasi, matematika dan sains peserta didik belum memenuhi standar nasional;</p> <p>8. Peran serta masyarakat dalam Pendidikan masih perlu di tingkatkan;</p> <p>9. Cakupan layanan perpustakaan dan Gerakan literasi masyarakat masih rendah;</p>

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
	2. Perlindungan Sosial Belum Inklusif, adaptif dan berkeadilan	1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan P3KE tidak Update dan Mutakhir, sehingga program - program kesejahteraan sosial tidak tepat sasaran; 2. Data Regsosek belum di manfaatkan untuk program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial; 3. Masih adanya Egoisme Sektoral atau mentalitas SILO pada Perangkat Daerah, utamanya untuk penanggulangan kemiskinan; 4. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial masih kurang; 5. Program penanggulangan kemiskinan bersifat parsial dan belum menyentuh langsung substansi masalah; 6. Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih rendah; 7. Pemenuhan SPM Sosial Masih rendah.
2. Masih rendahnya daya saing sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan dan pariwisata;	1. Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura perlu lebih di tingkatkan untuk mewujudkan swasembada pangan;	1. Belum optimalnya dukungan sarana produksi pertanian; 2. Penyediaan benih/bibit belum memenuhi prinsip 5 T yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga; 3. Kurangnya akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian; 4. Masih kurangnya pemanfaatan dan penerapan teknologi pertanian dan penerapan teknologi pasca panen; 5. Kapasitas SDM Pertanian masih rendah dan peran Kelembagaan Pertanian belum optimal;

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		<p>6. Adanya gangguan suplai air irigasi yang dapat berasal dari berkurangnya debit air di reservoir maupun karena bencana alam. Rasio Jaringan Irigasi yang tetap sejak 2018 dapat mengganggu rencana menjadikan Sulawesi Tengah sebagai Kawasan penyangga pangan Ibu Kota Nusantara (IKN);</p>
	<p>2. Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan masih perlu di tingkatkan;</p>	<p>1. Industri pengolahan hasil perkebunan masih kurang; 2. Penerapan teknologi pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan belum di terapkan secara optimal; 3. Konflik lahan industri perkebunan besar masih sering terjadi; 4. Kurangnya akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana Perkebunan; 5. Tingginya alih fungsi lahan ke aktivitas ekonomi yang dirasa lebih menguntungkan dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan dan lain sebagainya;</p>
	<p>3. Populasi dan produksi hasil peternakan masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan swasembada daging;</p>	<p>1. Usaha peternakan umumnya masih tradisional; 2. Jaminan ketersediaan dan kestabilan harga pakan ternak bagi petani ternak belum ada; 3. Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan belum optimal, di sebabkan oleh wilayah kerja yang luas tidak sebanding dengan tenaga keswan serta biaya operasional pelayanan terbatas;</p>

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		4. Usaha atau unit pembibitan ternak masih perlu di optimalkan;
	4. Belum optimalnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan;	1. Penggunaan teknologi oleh nelayan perikanan tangkap maupun budidaya yang masih sangat sederhana dan tradisional; 2. Masih tingginya harga pakan ikan dan biaya operasional yang berakibat pada produktifitas yang rendah; 3. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan akses terhadap teknologi perikanan; 4. Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya/tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, TPI, dan pelabuhan perikanan).
	5. Kesejahteraan petani, peternak dan nelayan masih rendah dan perlu ditingkatkan serta Kelembagaan petani, peternak dan nelayan yang belum berfungsi optimal;	1. Belum adanya jaminan ketersediaan pupuk sepanjang waktu dan harga yang tetap serta berubsidi bagi kelompok tani. 2. Belum terlaksananya pembentukan institusi usaha agribisnis bagi kelompok tani dalam peningkatan nilai tambah produk pertanian. 3. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan pengetahuan kelompok petani/pternak/nelayan dalam menjalankan usaha peningkatan kualitas produksi pertanian/perikanan. 4. Rendahnya akses pemasaran dan permodalan bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
	6. Belum Optimalnya Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi Masyarakat;	1. Masih banyak terdapat wilayah Rawan pangan; 2. Laju alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan cukup tinggi; 3. Lahan tidur dan Lahan pekarangan belum di manfaatkan secara optimal; 4. Belum ada Jaminan ketersediaan pangan daerah dan kestabilan harga; 5. Kesadaran yang masih rendah terhadap keanekaragaman bahan makanan pokok selain beras
	6. Belum Optimalnya Pengelolaan Kepariwisata;	1. Industri pariwisata belum memiliki daya saing tinggi dengan kontribusi sub sektor pariwisata yang masih berada dibawah rata-rata 5% pertahun dari total PDRB; 2. Infrastruktur pendukung (bandara, pelabuhan dan jalan) yang membentuk jaringan konektivitas wisata dunia dan nasional; hotel, cottage dan restaurant yang memenuhi standar wisata serta keamanan yang menjamin amenities para wisatawan masih kurang.
3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Belum Sepenuhnya Terwujud;	1. Kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum memadai;	1. Sistem, mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan publik masih kurang; 2. Kualitas dan Kuatitas aparatur pelayanan publik masih kurang; 3. Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan publik masih perlu di tingkatkan;
	2. Indeks Inovasi Daerah Cukup Baik, namun perlu di Tingkatkan;	1. Indeks Inovasi Daerah masih perlu ditingkatkan; 2. Inovasi dari berbagai Perangkat Daerah masih minim.
	3. Kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan daerah belum	1. Tenaga Fungsional perencana dan Fungsional peneliti masih kurang, belum memenuhi kuota yang dibutuhkan;

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
	optimal;	2. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan belum maksimal; 3. Hasil penelitian dan pengembangan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan; 4. Partisipasi masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media masa dalam pembangunan masih rendah;
	4. Kualitas Pengelolaan Keuangan dan asset daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan;	1. Masih adanya temuan BPK berkaitan dengan kesalahan administrasi pengelolaan keuangan daerah; 2. Pengamanan asset daerah belum optimal; 3. Transparansi/keterbukaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah kepada publik belum di laksanakan secara maksimal;
	5. Belum Maksimalnya Penggalan Potensi Pendapatan asli Daerah;	1. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah; 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah belum optimal dilakukan; 3. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah belum maksimal dilaksanakan; 4. Pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat belum maksimal
	6. Pengawasan dan akuntabilitas kinerja Pemda masih perlu ditingkatkan;	1. Fungsi Pengawasan masyarakat yang di laksanakan DPRD belum berjalan optimal; 2. Nilai SAKIP perlu di pertahankan dan di tingkatkan implementasinya;

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
	7. Kualitas Produk Hukum Daerah Belum optimal;	Masih tingginya kasus pelanggaran Perda Oleh masyarakat;
	8. Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah belum tepat fungsi dan tepat ukuran dan Tata Laksana yang belum berbasis TIK;	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih rendah; 2. Penataan Arsip Daerah belum maksimal;
	9. Kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah belum sesuai yang di harapkan;	Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Pemerintah masih rendah;
	10. Manajemen Sumber Daya Aparatur yang belum optimal	1. Kesejahteraan dan profesionalisme ASN belum optimal.; 2. Kapasitas SDM Aparatur masih rendah; 3. Sistem Merit belum sepenuhnya di terapkan.
4. Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro Perlu dijaga dan ditingkatkan;	1. Kesenjangan Ekonomi masih cukup tinggi	1. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang tinggi selama ini dan bahkan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional masih bersifat eksklusif karena belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat; 2. Pembangunan ekonomi dengan 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi PDRB tinggi yaitu (i) Industri Pengolahan; (ii) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (iii) Pertambangan dan Penggalian; (iv) Konstruksi dan (v) Perdagangan Besar dan Eceran belum memberikan dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan fiskal daerah;

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
	<p>2. Perekonomian Daerah belum sepenuhnya tangguh dan inklusif</p>	<p>3. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat;</p> <p>4. Nilai komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan belum maksimal memberikan nilai tambah (<i>add value</i>) bagi masyarakat dan daerah dikarenakan industri hilirisasi yang masih minim;</p> <p>5. Masih banyak komoditas mentah yang diekspor dan memberikan harga rendah sehingga biaya operasional ditingkat petani lebih rendah dari harga jual komoditas;</p> <p>6. Rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian masyarakat diakibatkan dari rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan terutama teknologi tepat guna, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang kurang, sehingga ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah.</p> <p>1. Kualitas koperasi dan usaha mikro masih rendah serta pertumbuhan wirausaha baru yang belum optimal;</p> <p>2. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro belum melakukan modernisasi dan mengakomodasi penerapan Inovasi teknologi dan informatika, utamanya untuk distribusi dan pemasaran;</p> <p>3. Kemitraan dalam pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro masih kurang, utamanya bantuan modal usaha dan Inovasi Produk;</p>

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Iklim usaha UMKM belum sepenuhnya mendukung; 5. Pengetahuan dan literasi Digital para pelaku UMKM masih terbatas 6. Nilai Ekspor daerah masih rendah 7. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah belum optimal; 8. Akses Industri Kecil Menengah terhadap modal dan pemasaran terbatas; 9. Belum siapnya IKM di era Digitalisasi ekonomi saat ini; 10. Ekonomi kreatif di sektor pariwisata belum berkembang dengan baik.
<p>5. Potensi bencana daerah yang cukup tinggi serta adanya ancaman degradasi lingkungan hidup;</p>	<p>1. Koordinasi dan integrasi Pemda dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah belum optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bencana yang terjadi sifatnya alami maupun non alami atau akibat ulah manusia, seperti: gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor dan pencemaran sebagai indikasi terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2. Pemanfaatan sumber daya alam belum dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup; 3. Koordinasi dan integrasi Pemda dan Masyarakat dalam penanggulangan Bencana Daerah belum optimal; 4. Sistem Peringatan Dini Bencana belum tersedia secara optimal; 5. Manajemen bencana berbasis masyarakat belum terlaksana dengan baik, terutama untuk sistem logistik pangan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak bencana baik alam maupun non alam;

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		6. RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan daerah;
	2. Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup serta dampak perubahan iklim belum terintegrasi dan terlaksana dengan baik	<p>1. Peningkatan jumlah penduduk berdampak kepada peningkatan laju penggunaan sumber daya alam, termasuk pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, mengakibatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup di sejumlah kawasan di Sulawesi Tengah mengalami perubahan dan penurunan;</p> <p>2. Sebaran kemampuan lingkungan dalam mendukung penyediaan pangan telah mengalami penurunan yang diindikasikan dengan tingginya persentase daerah rawan pangan, alih fungsi lahan yang tinggi dan beralihnya profesi petani ke profesi non petani;</p> <p>3. Sulawesi Tengah terindikasi adanya degradasi DAS berupa lahan gundul lahan kritis dan erosi akibat digunakan untuk pertanian maupun untuk penggunaan lain seperti permukiman dan pertambangan dikarenakan mengabaikan potensi yang ada di lingkungan DAS sendiri;</p> <p>4. Tingginya aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah seperti: kegiatan pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya memberikan dampak pada berkurangnya kemampuan dari ekosistem pendukung (supporting) berupa produksi utama formasi tanah, produksi oksigen, ketahanan tanah, penyerbukan dan ketersediaan habitat;</p>

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		<ul style="list-style-type: none"> 5. Kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan Lingkungan Hidup masih belum konsisten; 6. Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah; 7. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca tidak di implementasikan dengan optimal; 8. Data dan informasi geospasial belum tersedia.
6. Disparitas pembangunan antar wilayah masih cukup tinggi;	Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Sektor Pertambangan dan Penggalan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya perbedaan kandungan potensi sumberdaya alam antar wilayah provinsi sulawesi Tengah. 2. Sektor pertanian secara umum belum berorientasi pada industri menyebabkan nilai tambah di sektor pertanian masih sangat rendah.
7. Dukungan sarana dan prasarana dasar belum memadai;	1. Kualitas layanan Air bersih, air minum, sanitasi dan perumahan layak di perdesaan maupun perkotaan masih rendah;	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Kawasan kumuh dan Rumah Tidak layak Huni di perkotaan masih cukup tinggi; 2. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum belum memadai;
	2. Kualitas dan konektivitas jaringan jalan, jembatan dan sarana prasarana transportasi masih rendah dan tidak merata;	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah untuk membiayai infrastruktur transportasi/konektivitas masih terbatas; 2. Moda transportasi masih terbatas, belum memadai, terpadu dan nyaman; 3. Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan belum memadai; 4. Kontribusi sektor perhubungan terhadap peningkatan PAD belum optimal;

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
	3. Kualitas Jaringan Irigasi sesuai kewenangan masih perlu ditingkatkan;	1. Aksesibilitas, keberlanjutan, keamanan dan ketersediaan potensi Sumber Daya Air terbatas; 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi partisipatif;
	4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagai bidang untuk mendukung ekonomi digital dan E-Government belum optimal;	1. Masih terdapat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang Blank Spot; 2. Jaringan komunikasi dan informatika berteknologi terkini masih belum tersedia secara merata; 3. Kompetensi Aparatur di bidang TIK masih terbatas; 4. Literasi TIK masyarakat (<i>digital Society</i>) masih rendah.
8. Belum Adanya inovasi pembiayaan Pembangunan Daerah;	Pembiayaan inovasi pembangunan daerah masih sangat terbatas.	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih terbatas; 2. Pembangunan Daerah khususnya Infrastruktur membutuhkan Investasi yang cukup besar

3.2 ISU STRATEGIS

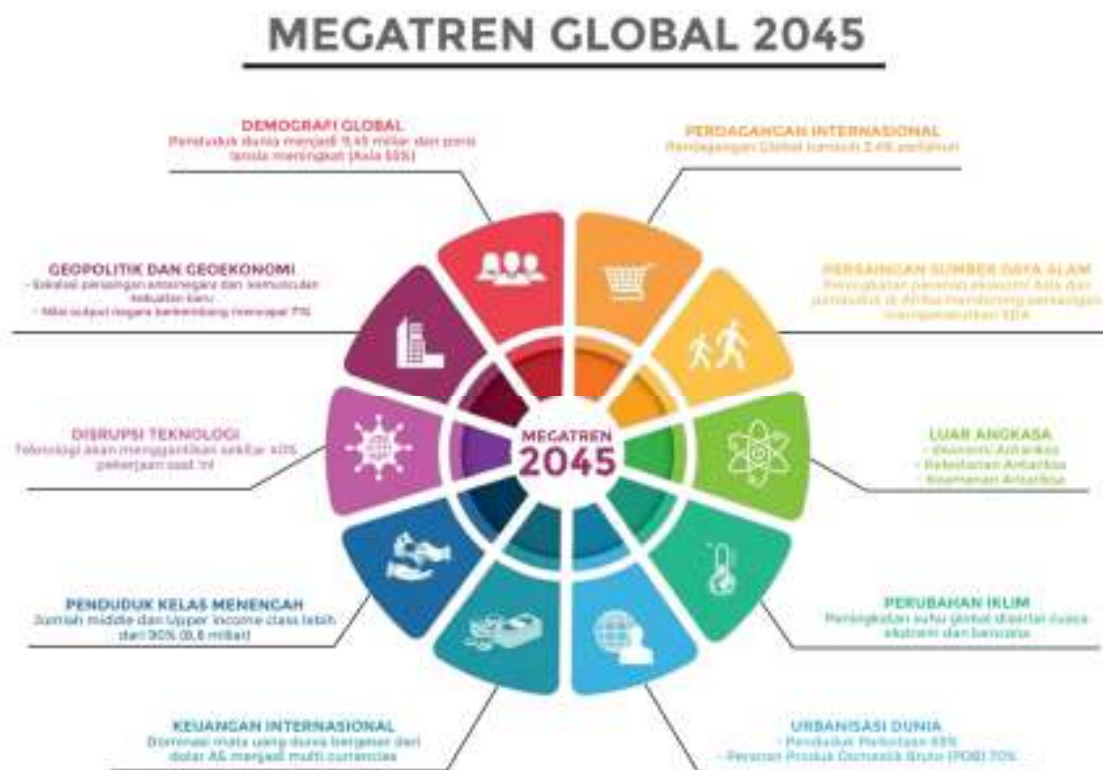
Rumusan isu strategis diperlukan analisis berkaitan dengan fakta dan data/informasi kunci untuk dipilih menjadi isu strategis berdasarkan permasalahan pembangunan yang berasal dari duni internasional, kebijakan nasional maupun regional.

3.2.1 ISU STRATEGIS GLOBAL

Seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang pembangunan maka tantangan global ke depan semakin kompleks atau yang dikenal sebagai Megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan. Sementara itu adanya pandemi covid telah menyebabkan perubahan pola kehidupan

sosial dan ekonomi masyarakat sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (new normal).

Terdapat 10 Megatren Global yang dapat mempengaruhi pembangunan di Sulawesi Tengah dalam menuju 2045. Megatren Global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi sebagai berikut:



Gambar 3.1
Megatren Global 2045

1. Perkembangan Demografi Global

Populasi dunia diperkirakan akan terus meningkat yang tentunya memberikan tantangan terkait dengan penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan selain itu, kebutuhan terhadap pangan energi dan listrik akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin panjang. Disamping itu meskipun jumlah penduduk terus bertambah namun laju pertumbuhannya

terus melambat hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Di sisi lain terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara terutama negara maju terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok usia tua dengan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan kerja.

2. Geopolitik dan Geo ekonomi

Tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia adalah Dinamika geopolitik global ke depan. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru kemunculan berbagai kekuatan baru telah mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan Global seperti sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan Global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya seperti konflik di Selat Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut Cina Selatan. Selain itu persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas, Nilai strategis kawasan Indo Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antar negara baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Geo ekonomi global di mana nilai output dunia negara berkembang akan semakin dominan. Peranan negara dunia maju akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun, namun secara umum pendapatan perkapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Perubahan struktur perekonomian, utamanya

di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

3. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti internet of Things (IoT) blockchain, hyper connection, artificial intelligence (AI), distributed Ledger teknologi (DLT), produksi lifecycle management, robotik process automation (RPA), Edge computing auto robotic system, 3D dan future technologies. Kesiapan dan adaptif dari masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi

Perkembangan teknologi di masa depan akan mempengaruhi di berbagai sektor pembangunan misalnya pendidikan Dengan inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis artificial intelligence, Pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan Proses bisnis Meskipun demikian tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia permodalan dan infrastruktur penunjang faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

4. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan sehingga dapat menyebabkan tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging ekonomis yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh misalnya pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat pemukiman dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri jasa dan Perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengolahan perkotaan karena kompak Kompleks melalui efisiensi layanan.

5. Konstelasi Perdagangan Global

Perekonomian negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan Intra-Asia yang menunjukkan trend yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional Bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi. Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat global value chain (GVC) dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai pangsa pasar yang substansial dan kompetensi SDM industri yang berkualitas khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan negara yang dapat beradaptasi dengan kemudian teknologi dan digital memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai Nilai perdagangan global.

6. Tata Kelola Keuangan Global

Pendapatan negara kedepan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi Belanja Negara pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging Society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi Belanja Negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran trend ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter Global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Trend penggunaan Central Bank Digital Curincy (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara juga merupakan terobosan untuk mengatasi resiko stabilitas aset krypto yang berpotensi menimbulkan sumber resiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro moneter dan sistem keuangan di masa depan.

7. Pertumbuhan Kelas Menengah Model Kelas

Pertumbuhan kelas menengah dunia diperkirakan akan semakin meningkat dan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat bergeser ke kawasan Asia

terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik, selain itu akan mendorong penciptaan jenis dan lapangan kerja baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup new lifestyle.

Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi pekerjaan melalui virtual metaverse serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

8. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam diantaranya air, pangan dan energi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan sumber daya alam global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran diantaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi

9. Perubahan Iklim

Perubahan iklim kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan terus berlangsung dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis Global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan trend dalam dinamika Pembangunan global, seperti

meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktek yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor seperti sektor energi industri lahan Kelautan dan pesisir pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler

Trend pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan alat pembangunan Global di masa mendatang stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi trend kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan Innovative Designs termasuk skala lebih kecil atau small modular reaktor (SMR). teknologi elektrolisis Green hidrogen dan fuel cell menunjukkan perkembangan yang positif terutama untuk transportasi berat seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker dan transportasi udara sebagai pengganti avtur serta pemanfaatan GH₂ sebagai feed stock industri petrokimia dan green amonia untuk pupuk

10. Pemanfaatan Luar Angkasa

Trend eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (common heritage of humankind) yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu telah mendorong banyak negara mengembangkan industry antariksa upaya tersebut

diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di Bumi proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga itu utama yaitu ekonomi antariksa (Space economy) kelestarian antariksa (space sustainability) dan keamanan antariksa (space security)

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan dan untuk jangka waktu yang panjang. olehnya itu negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal ini mengembangkan teknologi mutakhir dan kompetensi sumber daya manusia.

3.2.2. ISU STRATEGIS NASIONAL

1. Rendahnya tingkat produktivitas ditengah persaingan global yang semakin meningkat

Rata-rata produktivitas yang tercermin dari Total Factor Productivity (TFP) Indonesia selama tahun 2005 – 2019 tumbuh negative sebesar 0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971 – 1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005 – 2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut diantaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti system insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005 – 2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi melambat mejadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010 – 2015, kapasitas ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi semakin tertekan, tercermin dari pertumbuhan yang hanya mencapai rata-rata 4,0 persen selama tahun 2015 – 2022.

Selain itu, produktivitas yang rendah telah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial, dan bahkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial dibawah 5 persen. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat.

2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi disebabkan oleh masih lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81), Thailand (1,31) dan Malaysia (1,04) pada tahun 2020.

3. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai

Hal ini tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu jumlah penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1.790), Singapura (7.287) dan Korea Selatan (8.408) pada tahun 2019. Berikutnya ekosistem riset dan inovasi masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional. Kondisi ini juga terlihat dari jumlah paten yang diajukan Indonesia hanya sebanyak 1.445, jauh tertinggal dari Malaysia(1.863), Singapura (9.766) dan Korea Selatan (267,527) pada tahun 2021. Sementara dari sisi H-Indeks, Indonesia baru mencapai 284, relatif tertinggal dibandingkan Malaysia (415), Singapura (697), dan Korea Selatan (810). Selain itu, beberapa persoalan lain juga masih harus diatasi Indonesia seperti belum berkembangnya kesadaran ilmiah (scientific temper).

4. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun diantaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (dutch diseases), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan Tingkat suku bunga.

Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya Tingkat ketrampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Berbagai faktor tersebut kemudian menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan dari semula mencapai 27,41 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 18,34 persen pada tahun 2022. Sementara itu, produktivitas sektor pertanian terus melambat dari Rp. 41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya Rp. 22,9 juta per pekerja pada tahun 2022.

5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata

Kinerja pariwisata masih berada dibawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Disamping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan

pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.

Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumberdaya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan Sea Lines of Communication (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga PDB kemaritiman masih berada pada kisaran 7,60 persen. Rendahnya kontribusi ini juga disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industri dan emerging sektor lain yang memanfaatkan sumberdaya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Disisi lain, masih terdapat tantangan antara lain rendahnya penanganan sampah plastik, masih tingginya kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF), serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut. Meskipun demikian, peran kemaritiman dalam perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan mengingat potensi ekonomi kelautan yang besar.

7. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010 – 2022 masih relatif tertinggal

Produktivitas tenaga kerja Indonesia kurun waktu 2010 – 2022 yaitu sebesar US\$7.274,9 per pekerja, dibawah rata-rata Kawasan ASEAN sebesar US\$8.449,0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas diantaranya rendahnya kualitas SDM (56,3 persen tenaga

kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespon perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

8. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi

UMKM dan Koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen tahun 2029, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi diantaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (low-skilled workers) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dan rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan;

Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi tercermin dari porsi untuk produksi Listrik sebesar 87,1 persen (2021) dan emisi GRK 1.317 GtCO₂eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi.

10. Pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata diseluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi

Porsi EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat dari 4,24 persen tahun 2005 menjadi 12,30 persen tahun 2022. Namun ini menunjukkan masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil. Disamping itu, tingkat elektrifikasi di pedesaan Indonesia pada akhir tahun 2020 mencapai sekitar 98,67 persen. Akan tetapi secara umum kualitas akses listrik tersebut masih harus ditingkatkan. Selanjutnya masih terdapat beberapa wilayah yang belum tersentuh listrik serta memerlukan kebijakan afirmasi untuk mendapatkan akses listrik.

11. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau

Pencemaran air, udara dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (brown economy). Timbunan limbah B3 yang tercatat terus meningkat hingga mencapai 74 juta ton pada tahun 2022. Pada limbah domestik, hanya satu persen rumah tangga di Indonesia yang dilayani oleh Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Selain itu pemanfaatan sumberdaya alam yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan menyebabkan degradasi hutan, deforestasi dan berkurangnya keanekaragaman hayati, serta penegakan hukum dan regulasi termasuk pengaturan sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau masih lemah.

12. Teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas

Kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai, baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatan secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi penawaran, tantangan Pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan

infrastruktur TIK meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data center, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan infrastruktur TIK juga mengalami hambatan sulitnya kondisi geografi di beberapa daerah. Dari sisi permintaan, masih dihadapi tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal yang tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, serta daya beli yang rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet. Sementara itu, kondisi ekosistem pendukung digitalisasi seperti talenta digital, investasi untuk siber belum memadai. Dalam hal produk digital, Indonesia menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri.

13. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestic sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas;

Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022), infratraktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.

Jumlah dan peranan perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan akan terus meningkat dan menuntut perenanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan.

14. Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Sistem kesehatan harus mampu merespon berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan resiko terjadinya pandemi serta mampu menjawab

ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan.

Untuk mencapai pembangunan yang optimal di sektor pendidikan, Indonesia harus mampu mengatasi tantangan diantaranya layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antar wilayah dan sosial ekonomi masih tinggi. Kualitas pendidikan yang masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke seluruh daerah dan satuan pendidikan.

Dalam hal perlindungan sosial, perubahan struktur dan peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan penduduk lansia menuntut cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh di sepanjang siklus kehidupan.

15. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi

Hal ini ditunjukkan oleh elastisitas pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap pertumbuhan PDB per kapita perkotaan di Indonesia yang hanya mencapai 1,4 (1 persen pertumbuhan penduduk menaikkan pertumbuhan PDB per kapita perkotaan sebesar 1,4 persen), sedangkan di Tiongkok elastisitasnya mencapai 3,00. Sementara itu, tingkat urbanisasi dalam 10 tahun terakhir mencapai 0,67 persen per tahun, sementara Tiongkok 1,21 persen. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya keterbubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

16. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan

Dalam menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 31,90 pada tahun 2021. Budaya literasi, kreativitas dan inovasi belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan disparitas kemampuan literasi antar wilayah, serta akses penduduk terhadap TIK yang selalu meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti dengan kemampuan dalam memilah informasi. Peran dan fungsi keluarga juga belum optimal ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang baru mencapai 58,49 di tahun 2022 serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal.

Hal lainnya yaitu terkait kebebasan beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat dan berorientasi kemaslahatan serta penghormatan terhadap keragaman agama dan kebudayaan yang masih lemah, terlihat dari Indeks Kerukunan Umat Beragama baru sebesar 73,09 di tahun 2022. Selain itu ketimpangan gender juga masih tinggi ditandai dengan Indeks Ketimpangan Gender mencapai 0,458 pada tahun 2022.

17. Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi

Meskipun pembangunan kewilayah sejak desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1999 telah mencapai hasil yang signifikan, ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi. Pembangunan selama ini lebih terpusat di Pulau Jawa (Java centris), dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap nasional pada tahun 2022 adalah 57,8 persen. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah terutama disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di

seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama di KTI.

18. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya

Pembangunan infrastruktur terus didorong untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar, serta memperkuat integrasi nasional. Beberapa proyek besar infrastruktur yang sedang atau telah diselesaikan diberbagai wilayah meliputi pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, pembangkit listrik dan jaringannya, waduk, irigasi pertanian serta infrastruktur dasar dan perumahan. Pemerintah juga telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia.

Meskipun telah terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi seperti lemahnya tata Kelola dan koordinasi antar Lembaga, kurangnya pendanaan untuk Pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi Masyarakat.

Dalam kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar antara Jawa dan luar Jawa, tantangan utama yang dihadapi adalah belum sepenuhnya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana.

Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu yang terendah di Asia. Selanjutnya pelayanan tenaga Listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

19. Konektivitas laut dan penyebrangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal

Konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Tantangan yang juga dihadapi adalah masih terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan, terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, masih rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai tulang punggung layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler, terutama di pedesaan dan KTI.

Kesinambungan pembangunan penting dalam menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan penguatan implementasi dan pembiayaan pembangunan.

20. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas;

Dalam hal pembiayaan Pembangunan, terdapat sejumlah tantangan terutama yang dihadapi antara lain belum berkembangnya inovasi pembiayaan Pembangunan, tingginya cost of fund, dangkalnya sektor keuangan (terbatasnya basis sumber pendanaan dan peran sektor keuangan non bank, utamanya dana pensiun, asuransi dan pasar modal) serta belum optimalnya fungsi intermediasi dan inklusi keuangan, dimana inklusi keuangan baru mencapai 85,10 persen (2022).

3.2.3. ISU REGIONAL SULAWESI

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi penunjang Superhub ekonomi nusantara, pintu gerbang Internasional KTI dan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Selain itu, menjadi peluang munculnya kota-kota dengan peningkatan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Sulawesi sebagai penyangga berdirinya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Pulau Kalimantan.

Beberapa isu strategis di wilayah Sulawesi, yaitu sebagai berikut:

1. Potensi pembangunan Wilayah Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari letak geografis dan sumberdaya yang dimiliki yaitu terletak diwilayah ALKI II dan III dan berpotensi untuk mendukung peran Wilayah Sulawesi sebagai hub dan pintu gerbang international KTI;

Adanya pembangunan IKN di wilayah Kalimantan menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah Sulawesi sebagai daerah penyangga. Komoditas dan sektor potensial yang dapat dikembangkan terdiri atas komoditas pertanian (padi dan hortikultura), perkebunan (kakao, kelapa sawit, cengkeh, pala dan rempah-rempah), peternakan (ternak sapi), perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, selar, teri), industri logam dasar (nikel, tembaga, emas dan perak), mineral aspal serta pariwisata. Selain itu, potensi nikel dan tembaga di Wilayah Sulawesi dapat mendukung pengembangan dan implementasi EBT, serta potensi ekspor yang menjanjikan.

Potensi-potensi komoditas dan sektor potensial bernilai tambah telah termanfaatkan namun hasil pembangunan belum bisa terwujud secara optimal. Optimalisasi pengembangan komoditas dan sektor potensial bernilai tambah dilakukan untuk mendukung arah pengembangan wilayah Sulawesi dimasa mendatang.

- 2.** Kontribusi ekonomi wilayah Sulawesi terhadap PDB Nasional masih rendah;

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah (15,27 persen) tidak diimbangi oleh provinsi lainnya (2,30 – 5,09 persen) yang dibawah laju pertumbuhan ekonomi nasional (5,31 persen), sehingga secara umum dampak terhadap kontribusi ekonomi secara nasional tidak signifikan. Kesenjangan ekonomi antar wilayah kepulauan dengan daratan juga masih menjadi isu pembangunan. Selain itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti WM, KI, KEK, dan DPP masih belum memberikan dampak secara optimal dalam mempercepat penurunan persentase penduduk miskin di Wilayah Sulawesi. Kawasan perdesaan, termasuk Kawasan transmigrasi juga belum optimal dikembangkan sebagai daerah penyanggah dari pusat-pusat pertumbuhan.

- 3.** Aspek daya saing akibat dari aspek pembiayaan menjadi hambatan Pembangunan di wilayah Sulawesi;

Relatif rendahnya daya saing wilayah menjadi penghambat pembangunan ekonomi di Wilayah Sulawesi. Kondisi stabilitas makro dan kemandirian fiskal menjadi perhatian. Aspek pembiayaan juga masih menjadi isu pembangunan di Sulawesi Tengah. Share penyaluran kredit perbankan di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya kredit investasi dan kredit sektor jasa masih cenderung rendah daripada daerah sebanding.

- 4.** Kualitas sumberdaya manusia masih rendah dengan daya saing yang belum kompetitif;

Hambatan pada aspek SDM kesehatan masih dialami oleh sebagian besar provinsi di wilayah Sulawesi, seperti Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Faktor penghambat infrastruktur masih ditemukan di Provinsi

Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Aspek SDM Pendidikan juga menjadi penghambat pembangunan terutama di Provinsi Sulawesi Barat dan aspek makro dan fiskal menjadi penghambat utama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tingkat kemiskinan juga masih relatif tinggi ditemui di Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Hambatan-hambatan tersebut menjadi dasar untuk mengelaborasi isu-isu pembangunan di Wilayah Sulawesi.

5. Kondisi Infrastruktur Dasar, Interkonektivitas domestik belum optimal;

Pelabuhan yang menjadi simpul utama di Wilayah Sulawesi seperti Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara) belum berperan optimal sebagai hub transshipment KTI karena belum optimalnya pengembangan Kawasan-kawasan ekonomi di Pulau Sulawesi. Spot pelabuhan di Wilayah Sulawesi belum terkoneksi dengan optimal, baik untuk jalur perdagangan, pariwisata maupun penumpang domestik. Demikian juga untuk infrastruktur bandara yang belum terkoneksi dengan baik, terindikasi dengan masih tingginya biaya penerbangan antar provinsi di Sulawesi serta jaringan konektivitas penerbangan yang belum tertata dengan baik disamping sarana dan prasarana penunjang bandara belum memadai apabila diperhadapkan dengan rencana berdirinya IKN baru.

Kualitas dan kuantitas jalan, serta ketersediaan dan realibilitas listrik masih kurang, sarana dan prasarana pemukiman, khususnya air bersih dan sanitasi, belum terpenuhi secara optimal dan jaringan telekomunikasi juga masih relatif rendah. Disamping itu, Wilayah Sulawesi diperhadapkan pada risiko bencana yang cukup tinggi, terutama terkait gempa dan likuifaksi. Oleh karena itu, faktor infrastruktur masih menjadi faktor penghambat pembangunan, terutama di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

6. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah Sulawesi masih belum optimal

Belum optimalnya pengelolaan institusi dapat menghambat peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Jumlah laporan masyarakat terkait maladministrasi pelayanan publik di Wilayah Sulawesi masih cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Sulawesi juga masih belum optimal dalam memanfaatkan TIK. Resiko korupsi di Wilayah Sulawesi juga masih relative tinggi. Berdasarkan hasil survei penilaian integritas untuk pemetaan resiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi tahun 2022, sebagian besar provinsi di Wilayah Sulawesi masih tergolong rentan dan sangat rentan. Disisi lain, pencapaian SPM di Wilayah Sulawesi tergolong baik dan diatas rata-rata nasional, walaupun dengan Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) dibawah rata-rata nasional.

Kemandirian fiskal juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan di Wilayah Sulawesi, selain itu perlu juga memperhatikan kualitas belanja daerah yang juga masih rendah. Ke depan, dengan adanya pelanggaran aktivitas masyarakat, pemerintah daerah perlu memberikan insentif bagi dunia usaha sehingga dapat meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada Pemerintah Pusat.

7. Ketimpangan gender, perkawinan anak dan pembangunan kebudayaan;

Berdasarkan capaian indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2021, ketimpangan gender disebagian wilayah Sulawesi masih cukup lebar, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Angka perkawinan anak di Wilayah Sulawesi juga masih tinggi, terutama di Provinsi Sulawesi Barat hingga mencapai 17,71 persen. Terkait pembangunan kebudayaan, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Gorontalo juga masih masuk ke dalam kategori rendah.

8. Deforestasi, Ketersediaan air dan Kerentanan Pesisir.

Deforestasi, ketersediaan air dan kerentanan pesisir di Wilayah Sulawesi masih menjadi isu dalam pembangunan ketahanan ekologi. Luas tutupan hutan pada tahun 2000 adalah 10,1 juta hektar dan diproyeksikan akan terus berkurang hingga menjadi 8,7 juta hektar pada tahun 2045. Tingginya laju deforestasi tersebut akan berdampak pada meningkatnya ancaman kepunahan tumbuhan dan satwa liar, serta kehilangan jasa ekosistem esensial. Selain itu, beberapa bagian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara akan mengalami kelangkaan ketersediaan air. Selanjutnya masih sering terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan akibat praktik penggalian dan pertambangan. Wilayah Sulawesi memiliki (5) lima perairan pesisir yaitu Teluk Tomini, Teluk Tolo, Selat Makassar, Laut Sulawesi dan Laut Banda yang kesemuanya sangat rentan dengan aktivitas destructive manusia yang mengancam punahnya ekosistem pesisir.

3.2.4 ISU STRATEGIS SULAWESI TENGAH

Berdasarkan analisis kondisi di masa mendatang dan berdasarkan evaluasi permasalahan di masa lalu serta prediksi kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh daerah, maka isu strategis Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Masih Kurangnya Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing

Pembangunan di Sulawesi Tengah sudah semestinya mengandalkan sumber daya manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa mendatang akan bisa diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang sekarang kita miliki masih perlu ditingkatkan, agar tantangan tersebut bisa teratasi dengan baik.

Penduduk Sulawesi Tengah yang berjumlah besar dapat menjadi modal pembangunan bila memiliki kualitas yang memadai. Hal ini mengacu pada konsep bahwa manusia merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Artinya, dengan kualitas penduduk yang rendah, maka manusia akan lebih banyak berperan sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan.

Kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah telah meningkat secara kuantitatif, khususnya jika dilihat dari perkembangan data Indeks Pembangunan Manusia sudah berada pada kategori tinggi, namun secara kualitatif kapasitas dan daya saing sumber daya manusia yang dimiliki relatif masih lemah jika dibandingkan dengan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia dari daerah-daerah yang lebih maju. Permasalahan dari pemetaan indikator-indikator IPM adalah kontribusi tiga komponen tersebut belum merata, kontribusi pembentukan IPM lebih banyak diberikan oleh komponen pendidikan, sedangkan komponen kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat masih rendah yang ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan Stunting di Sulawesi Tengah.

Dari sisi kesehatan yang digambarkan dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) di Sulawesi Tengah semakin membaik. kualitas pelayanan kesehatan dan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, namun permasalahan yang masih dirasakan yaitu penyebaran tenaga medis dan paramedis di Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah belum merata dan masih terbatas serta belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pelaksanaan tugas belum mencapai tingkat maksimal.

2. Terbatasnya Hilirisasi Sektor Pertanian, Perikanan Dan Kelautan, Dan Pengolahan Hasil Pertambangan

Potensi pembangunan wilayah Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari letak geografis dan sumber daya yang dimiliki. Posisi geografis wilayah Sulawesi Tengah yang terletak diantara ALKI II dan III berpotensi untuk mendukung sebagai hub dan pintu gerbang internasional KTI dan juga adanya pembangunan IKN di Wilayah Kalimantan menjadi peluang untuk peningkatan aktifitas ekonomi sebagai daerah penyanggah. Sulawesi Tengah telah memberikan sumbangsih untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah telah diarahkan untuk menjadi kawasan penunjang IKN, utamanya penyiapan kawasan pangan dan perkebunan nasional. Selain itu juga sebagai pusat pengolahan pertambangan.

Sulawesi Tengah memiliki beberapa komoditas unggulan daerah dari sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan seperti: padi, jagung, kakao, kelapa dalam, sapi potong, rotan, getah pinus, nikel, gas alam, ikan tuna dan rumput laut. Sampai saat ini, tingkat produktivitas sektor unggulan daerah masih berada dalam kategori rendah karena nilai tambah produk yang belum memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat Sulawesi Tengah, meskipun persentase tenaga kerja dan profesi di sektor petani, pekebun, penambang dan nelayan memiliki persentase terbesar dibandingkan profesi lainnya.

Tingkat produktivitas sektor unggulan yang masih minim disebabkan oleh proporsi tenaga kerja yang besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan cenderung memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang rendah sehingga akses petani/pekebun/nelayan

terhadap kemampuan pengelolaan dan aksesibilitas terhadap faktor produksi terutama lahan, peralatan dan modal adalah sangat minim yang selanjutnya tingkat pengembalian dari keuntungan usaha akan menjadi rendah dan cenderung penduduk pada profesi sektor-sektor unggulan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Oleh karena itu, komoditas sektor unggulan harus memiliki kriteria tertentu sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, diantaranya yaitu (i) komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya, komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran; (ii) komoditas unggulan mempunyai keterkaitan dari hulu sampai hilir dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya; (iii) seharusnya komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya; (iv) komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi; dan (v) arah pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.

Sulawesi Tengah memiliki potensi sektor pertanian, perikanan dan kelautan yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Sektor pertanian Perikanan dan Kelautan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebesar \pm 60%. Sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah menjadikan pertanian, perikanan dan kelautan sebagai sumber penghidupan utama sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sektor pertanian, perikanan dan kelautan terus didorong agar menjadi sektor andalan di Sulawesi Tengah. Jika dilihat dari

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut Lapangan Usaha (persen) pada tahun 2023, maka lapangan usaha pertanian, perikanan dan kelautan memberikan andil yang cukup besar yaitu 14,78% yang menempati posisi kedua dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 15,59% (BPS Sulteng, 2024).

Sampai saat ini, sektor pertambangan dan penggalian, khususnya nikel dan gas bumi terus mendominasi, sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan produktivitas tanaman pertanian dan hasil tangkap perikanan untuk kesejahteraan para petani dan nelayan. Langkah kedepannya yaitu memajukan sektor pertanian seperti pemanfaatan sumber daya pertanian (modal, teknologi, pasar, informasi, lahan, alsintan) secara optimal, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian, pembinaan skill dan talenta petani millennial serta sektor perikanan dan kelautan, seperti peningkatan hasil tangkap laut melalui sarana dan prasarana (kapal ikan, alat tangkap, smart fishing) yang modern, teknologi budidaya perikanan dan konservasi habitat-habitat pesisir yang berkelanjutan.

Hal tersebut diatas, merupakan yang terpenting dalam upaya percepatan kesejahteraan petani dan nelayan juga masyarakat secara luas dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan dalam berinvestasi.

Sulawesi Tengah memiliki keanekaragaman wisata yang meliputi wisata Bahari, wisata alam, wisata budaya dan Wisata Geopark yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Isu strategis kedepannya yaitu bagaimana meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan ekonomi daerah melalui nilai tambah pariwisata yang saling terkait satu sama lainnya. Kondisi saat ini, pariwisata yang ditawarkan belum memiliki hubungan obyek wisata yang saling terkait dan mendukung antara satu dengan lainnya, misalnya wisata Bahari

yang ditawarkan belum dilengkapi dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti: bandara dan pelabuhan yang memadai, hotel dan cottage, restaurant dan kuliner lokal serta aksesibilitas jalan yang memadai.

Kondisi obyek wisata yang tidak berdiri sendiri atau wisata yang dapat menggerakkan pusat-pusat perekonomian lainnya maka akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lainnya, kondisi inilah yang dimaksudkan sebagai nilai tambah. Sudah saatnya, pariwisata Sulawesi Tengah mempromosikan paket wisata bernilai tambah. Sulawesi Tengah tidak hanya sekedar melakukan strategi business as usual atau hanya menjadi trend followers tetapi keanekaragaman budaya, bahasa, kuliner, dan alam yang dimiliki dapat mengantarkan Sulawesi Tengah menjadi pusat pariwisata nasional bahkan dunia.

Kedepannya isu pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Tengah harus diikuti dengan kegiatan mempertahankan kualitas lingkungan (carrying capacity), meningkatkan kualitas tata kelola destinasi, meningkatkan pelayanan pariwisata yang prima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, membuka aksesibilitas udara, darat, dan laut, membuka peluang investasi sektor pariwisata, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya di daerah-daerah wisata.

Upaya peningkatan pariwisata yang berkualitas ditunjukkan dengan peningkatan nilai tambah yang dapat diterima oleh Sulawesi Tengah atau masyarakat setempat, peningkatan nilai devisa melalui peningkatan lama tinggal dan belanja para wisatawan, peningkatan kualitas destinasi, kesiapan industri dan masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Penerimaan nilai tambah dipersiapkan dengan peningkatan daya saing dan membangun ketahanan sektor pariwisata, termasuk melalui diversifikasi aktivitas ekonomi dalam rantai pasok pariwisata,

perbaikan lingkungan usaha mikro, kecil, dan menengah yang kondusif dan berkenambungan serta pembangunan citra pariwisata Sulawesi Tengah yang berkualitas.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sangat tinggi selama kurun beberapa tahun terakhir, bahkan berada di atas rata-rata nasional, namun masih bersifat eksklusif karena belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat.

Pembangunan ekonomi dengan 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi PDRB tinggi yaitu (i) Industri Pengolahan; (ii) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (iii) Pertambangan dan Penggalian; (iv) Konstruksi dan (v) Perdagangan Besar dan Eceran belum memberikan dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan fiskal daerah. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat.

3. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), maka dilakukan Reformasi Birokrasi sebagai langkah awal. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melaksanakan pembangunan daerah. Birokrasi pemerintah daerah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan

dan pelayanan publik. Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Isu-isu tata kelola pemerintahan yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik yaitu berupaya optimal untuk mewujudkan aspek-aspek pembentuk zona integritas. Aspek-aspek tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Aspek manajemen perubahan memiliki tujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja individu untuk menjadi lebih berintegritas. Aspek Penataan Tata Laksana menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi sistem dalam layanan, prosedur kerja dibuat secara jelas, tepat dan cepat. Aspek Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Aspek Penguatan Akuntabilitas merupakan perwujudan tanggung jawab instansi dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah Aspek Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi.

Kedepannya Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah memiliki tantangan tentang hal ini, dikarenakan tuntutan profesionalitas ASN yang tepat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Di kondisi saat ini, tata kelola pemerintahan perlu dibenahi lagi untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif seharusnya

Memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Namun untuk konteks daerah masalah pelayanan publik sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut diatas, mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan indikasi bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah daerah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas.

Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, system dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi.

Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah telah berkomitmen mendukung pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tahun 2030, dan komitmen itu antara lain diwujudkan melalui program dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang pada periode-periode sebelumnya, namun implementasinya masih belum bisa terwujud sepenuhnya. Isu-isu yang terkait pembangunan berkelanjutan di daerah Sulawesi Tengah seperti: penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, antisipasi perubahan iklim, dan perlindungan laut dan kemaritiman.

Perkembangan kehidupan masyarakat di masa mendatang ditunjukkan dengan semakin cepatnya perubahan dalam segala bidang kehidupan, semua itu diakibatkan efek globalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sangat akseleratif. Negara-negara dengan tingkat kapabilitas teknologi informasi yang tinggi akan memiliki daya inovasi dan daya saing yang sangat besar yang sanggup menentukan arah perkembangan ekonomi dalam skala global. Pengembangan Iptek dan riset di Sulawesi Tengah dirasakan masih sangat minim, terlihat dari aplikasi penerapan teknologi dan berbasis riset yang masih kurang dalam pengelolaan bidang-bidang produksi seperti sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

Dengan kondisi dunia yang telah berubah sedemikian cepat dan dengan hadirnya revolusi industri 5.0 yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi AI (Artificial Intelligence), ICT (Information Communication Technology), IoT (Internet of Things), Biotechnology dan Driverless Vehicles, maka sudah saatnya proses transformasi ini segera dapat direspon oleh daerah dan dilaksanakan melalui kebijakan strategis nasional dan daerah dalam bidang iptek dan pendidikan tinggi. Hal pokok dalam mendukung Indonesia 5.0, bagi daerah Sulawesi Tengah adalah mempercepat pembangunan iptek dan riset di daerah. Oleh karena itu peran riset iptek dan riset harus segera ditingkatkan dengan kebijakan pengarusutamaan (mainstreaming) riset iptek daerah melalui perencanaan yang terintegrasi secara nyata dan konsisten dengan dunia industri.

Penerapan Iptek, Riset dan inovasi menjadi kunci bagi daerah untuk tumbuh menjadi provinsi maju dengan daya saing tinggi. Oleh karena itu, ekosistem kebijakan berbasis Iptek, Riset dan inovasi harus terus ditumbuhkan. Selain itu, pengembangannya pun patut dijadikan prioritas pembangunan daerah oleh pengambil kebijakan.

Isu-isu yang terkait Iptek dan Riset yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menjadi penggerak daya saing daerah, kontribusi teknologi tinggi terhadap ekspor

manufaktur juga masih rendah, sumber daya Iptek yang meliputi pendanaan, jumlah dan kualitas peneliti dan perekayasa, hingga tingkat produktivitas Iptek yang berkaitan dengan paten dan publikasi ilmiah juga masih belum optimal.

Untuk menjawab isu-isu diatas, perlu disusun strategi yang tepat, yaitu: pertama, adopsi dan penerapan Iptek. Kedua, peningkatan kemampuan dan kemandirian Iptek. Ketiga, pengembangan teknologi berbasis maritim. Keempat, pengembangan dana inovasi. Kelima, pelembagaan dan kerjasama model penta-helix, dan keenam, pengembangan Iptek berbasis budaya. Olehnya diperlukan penguatan kemitraan diantara pemerintah daerah, dunia industry dan perguruan tinggi. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para akademisi dan peneliti di perguruan tinggi dapat diaplikasikan oleh industri dan dikembangkan menjadi produk komersial untuk kepentingan pasar dan bisnis.

4. Kondisi Infrastruktur, Baik Infrastruktur Dasar Maupun Konektivitas Masih Belum Optimal

Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Sulawesi Tengah masih menjadi salah satu isu strategis. Kondisi geografis Sulawesi Tengah berupa kepulauan, perbukitan, pedalaman dan hutan membuat sulit dalam penataan aksesibilitas dan konektivitas atau jaringan penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Aksesibilitas yang rendah menyebabkan sulitnya suatu daerah untuk dijangkau sehingga terjadi perlambatan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, muncul berbagai permasalahan klasik yang ditemui daerah dan masyarakat, seperti tingginya daerah rawan pangan, harga barang-barang pokok tinggi, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tidak maksimal, kemampuan digitalisasi rendah, pembangunan tidak merata serta kondisi keamanan daerah yang rentan terhadap ancaman. Demikian juga dengan konektivitas yang

rendah akan menyebabkan pemerataan pembangunan yang tidak merata karena terhambat pada terbatasnya tata kelola jaringan penghubung antara wilayah-wilayah yang minus ekonomi dengan sentra-sentra produksi atau pusat-pusat ekonomi.

Penguatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka diperlukan tercapainya kondisi aksesibilitas dan konektivitas yang ideal sehingga dapat mendukung perkembangan wilayah dan pemerataan pembangunan dapat tercapai.

Pengembangan wilayah pedesaan di Sulawesi Tengah masih memerlukan dukungan aksesibilitas yaitu kemudahan atau keterjangkauan oleh wilayah lain atau keterjangkauan pedesaan terhadap wilayah sekitarnya. Jika aksesibilitas terbangun maka akan membuka peluang besar untuk potensi pengembangan wilayahnya. Adapun konektivitas dapat diartikan sebagai keberadaan aksesibilitas yang mampu mempermudah jangkauan antar wilayah yang berarti akses terhadap keanekaragaman informasi yang tersedia dalam skala global yang mendukung pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah. Indikasi yang akan diwujudkan pada 20 tahun mendatang yaitu tersedianya jaringan jalan antar daerah baik Kondisi Jalan maupun Jenis Jalan yang mendukung dalam mengakses wilayah selanjutnya akan tersedia tersedianya sistem jaringan lainnya seperti: jaringan listrik, telepon seluler, internet dan lainnya.

Upaya yang hendak dilakukan dalam rangka isu strategis tersebut, yaitu: pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang menghubungkan

hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan serta ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Ketersediaan infrastruktur dan literasi (kemampuan penguasaan) digital di Sulawesi Tengah, masih minim dikarenakan masih banyaknya daerah di kabupaten/kota yang masih ber status ‘blank spot’. Hal yang paling prioritas yaitu tersedianya infrastruktur digital yang menjangkau hingga daerah-daerah pedesaan di kepulauan, pegunungan, pedalaman dan area hutan. Biaya pengadaan infrastruktur adalah tergolong mahal sehingga diperlukan langkah awal berupa perencanaan yang baik, terarah dan terukur.

Literasi digital sangat penting dalam era digital saat ini dan di kemudian hari karena teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan menjadi alat yang penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Kemampuan literasi digital yang baik akan membantu seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus dalam dunia teknologi dan meningkatkan kesempatan untuk sukses dalam bidang yang terkait dengan TIK.

Saat ini, isu infrastruktur dan digital di Sulawesi Tengah dikategorikan minim karena masih kurangnya akses ke perangkat teknologi dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknologi terutama bagi kaum milenial. Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat dan cara menggunakan teknologi digital, sehingga tidak tertarik untuk meningkatkan kemampuan. Pemanfaatan teknologi informasi teknologi juga belum sepenuhnya, seperti rendahnya kemampuan masyarakat untuk terhindar dari korban penipuan dan berita hoaks di platform daring yang tidak terlepas dari masih rendahnya literasi

keamanan digital warga sehingga diperlukan upaya lebih masif untuk meningkatkannya.

Pihak pemerintah daerah telah melakukan kolaborasi dengan pihak swasta untuk meningkatkan literasi digital di Sulawesi Tengah melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, namun masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh

5. Ketimpangan Gender, Perkawinan Anak, Dan Pembangunan Kebudayaan Dalam Pembangunan Sosial

Ketimpangan gender telah menjadi isu di sebagian besar negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keteraan gender ditempatkan sebagai aspek yang sangat penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indeks ketimpangan gender Sulawesi Tengah pada tahun 2022 menurun mencapai angka 0,477 persen. Hal ini membuktikan bahwa ketimpangan gender yang terjadi di Sulawesi Tengah semakin menurun walaupun masih cukup tinggi masih dibawah capaian nasional yang berada diposisi 0,459.

Tiga dimensi penyusun IKG yaitu dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja, capaian Provinsi Sulawesi Tengah pada dimensi pasar tenaga kerja sudah sedikit lebih baik diatas capaian nasional, namun capaian variabel pembentuk di 2 dimensi lainnya berada dibawah capaian nasional.

Terkait dengan perkawinan anak, UU No. 16 tahun 2019 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan batas usia untuk melaksanakan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah

19 tahun. Pernikahan dibawah usia tersebut dapat dikategorikan pernikahan dini/anak. Pernikahan dini adalah merupakan pelanggaran hak anak dan pernikahan ini dipercaya berkontribusi positif terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, pernikahan dini juga dapat meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan serta risiko anak yang dilahirkan menderita stunting. Untuk tahun 2022, pernikahan anak Provinsi Sulawesi Tengah masih tinggi dan bahkan menduduki peringkat tertinggi kelima di Indonesia dengan angka 12,56%.

Selanjutnya, terkait dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrument untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Diperlukan berbagai upaya, langkah dan strategi dalam rangka perbaikan ketimpangan gender, perkawinan anak, dan pembangunan kebudayaan dalam pembangunan sosial.

6. Potensi Bencana Daerah Yang Cukup Tinggi Serta Adanya Ancaman Degradasi Lingkungan Hidup;

Berkaitan dengan penanggulangan bencana, isu yang mengemuka adalah masih rendahnya kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan bencana. Penanggulangan bencana kedepan harus di fokuskan pada upaya untuk meningkatkan tata kelola resiko bencana yang ada dan kolaborasi dengan melibatkan semua pihak. Resiko bencana akan tetap ada selama manusia masih beraktifitas, tapi dengan kesiapan dan monitoring yang di laksanakan, di harapkan bisa mengurangi resiko yang ditimbulkan.

Lingkungan yang berkelanjutan dapat menyediakan sumber-sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan, sehingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah

prioritas utama dalam pembangunan dimasa mendatang. Sulawesi Tengah sebagai daerah rawan bencana perlu ditata dengan pembangunan berbasis mitigasi bencana sehingga dampak-dampak yang akan terjadi akibat bencana dapat diminimalisir. Selain itu, upaya peningkatan kualitas penelitian yang berkenaan dengan lingkungan hidup diperlukan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan. Diperlukan perhatian dan peningkatan indeks-indeks sebagai ukuran peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Resiko Bencana, Indeks Ketahanan Energi, Indeks Ketahanan Air, Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks ketahanan daerah

Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi penting untuk tujuan pengelolaan lingkungan hidup karena pada masa-masa yang akan datang tingkat kerusakan lingkungan akan mulai berdampak. Daya dukung lingkungan merupakan suatu kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia harus dijaga agar senantiasa dapat memberikan dukungan yang maksimum kepada kehidupan manusia. Daya dukung alam dapat berkurang sejalan dengan perubahan waktu. Daya dukung alam dapat berkurang sejalan dengan perkembangan waktu. Daya dukung alam dapat berupa kekayaan alam yang terdapat didalam bumi (permukaan bumi dan perut bumi).

Daya dukung alam sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan alam harus perlu dijaga dalam suatu eksistensinya terhadap daya dukung alam agar tidak rusak.

Dampak perubahan iklim, kerusakan lingkungan serta tidak selesainya masalah kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka dirumuskan pendekatan baru yang disebut dengan green economy (ekonomi hijau) sebagai tatanan ekonomi dengan prinsip penggunaan sumberdaya yang se efisien mungkin dengan menghasilkan karbon semimumum mungkin. Dalam perjalanannya

ekonomi hijau masih terdapat banyak kekurangannya karena bersifat eksklusif dan tidak masif sehingga tujuan globalnya membuat emisi gas rumah kaca semakin tidak efisien. Untuk itu dirumuskan pendekatan baru yang dikenal dengan Blue Economy (ekonomi biru) yang mempunyai esensi melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan limbah seminimum mungkin sehingga dari segi lingkungan menjadi solusi nyata untuk memecahkan masalah pencemaran lingkungan.

Prinsip ekonomi biru pada tata kelola sektor kelautan dan perikanan sebagai bentuk komitmen pada dunia dimana ekonomi biru merupakan upaya pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat dengan mengedepankan keberlanjutan ekosistem laut. Melalui program ekonomi biru diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditingkat daerah maupun ditingkat nasional.

Pemerintah daerah harus menetapkan dan menegakkan peraturan yang mendorong keberlanjutan. Hal ini dapat mencakup peraturan lingkungan hidup, standar ketenagakerjaan, dan undang-undang perlindungan konsumen. Pemerintah memerlukan kapasitas untuk merancang, menerapkan, dan memantau kebijakan pembangunan berkelanjutan secara efektif. Hal ini sering kali melibatkan investasi pada sumber daya manusia, pengumpulan data, dan teknologi.

Tata kelola untuk pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang yang mempertimbangkan dampak keputusan terhadap generasi mendatang. Pemikiran jangka pendek dapat mengarah pada praktik-praktik yang tidak berkelanjutan. Banyak tantangan keberlanjutan yang bersifat global (misalnya perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati). Kerja sama dan perjanjian internasional sangat penting untuk mengatasi

permasalahan ini secara efektif. Tata kelola harus fokus pada pembangunan ketahanan dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial, seperti perubahan iklim, bencana alam, dan guncangan ekonomi. Kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan dan peran mereka dalam mencapainya.

Tata kelola untuk pembangunan berkelanjutan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan pendekatan adaptif dan berulang. Hal ini melibatkan kerja sama di semua tingkat pemerintahan, dari lokal hingga global, dan bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sipil dan sektor swasta. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang kompleks dan memiliki banyak aspek, namun tata kelola yang efektif merupakan komponen penting dari setiap strategi yang berhasil untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

7. Inovasi Pembiayaan Pembangunan Dalam Mendukung Kestinambungan Pembangunan Masih Terbatas;

Pandemi telah mengakibatkan efek domino pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan sehingga secara keseluruhan memberikan tekanan pada sisi supply dan demand. Program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas telah membantu pemulihan kondisi ekonomi yang mengalami tekanan berat. Akan tetapi, tantangan selanjutnya ada pada fase fase recovery dan thrive, yang membutuhkan kebijakan yang dapat meningkatkan supply dan demand dalam perekonomian.

Pemerintah Pusat saat ini telah mendorong Kementerian/Lembaga untuk menggunakan skema pembiayaan inovatif seperti skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hal ini diperlukan sebagai bentuk dukungan percepatan pembangunan dengan melibatkan peran aktif dan partisipasi

swasta. Melalui skema KPBU, diharapkan pembangunan infrastruktur selama dan setelah pandemi dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan infrastruktur dasar bagi masyarakat dapat tersedia secara tepat waktu.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu mendorong untuk mengimplementasikan skema pembiayaan inovatif mengingat keterbatasan APBD yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan utamanya pada bidang infrastruktur. kebutuhan infrastruktur tidak dapat dibangun dengan cepat melalui pendanaan dengan pola tradisional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu mencoba pola yang sudah dilakukan pemerintah pusat, dengan berbagai inovasi misalnya dengan pinjaman daerah ataupun opsi-opsi lainnya.